

**DETERMINAN INTERNET REPORTING PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA**

***DETERMINANTS OF INTERNET REPORTING IN INDONESIA LOCAL
GOVERNMENT***

VICKY DWIRAMA

20150420255

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

Email : vickydwirama03@gmail.com

INTISARI : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompetisi politik, Kekayaan Daerah, Opini Audit, Akuntabilitas Kinerja terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan Teknik Archival dengan pengujian hipotesis. Populasi pada penelitian ini terdiri dari Pemerintah Daerah level 415 dan 93 level kota pada tahun 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat data-data yang dibutuhkan, mencatat, menganalisis *annual report* pada pemerintah kabupaten dan kota tahun 2017. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Data yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat uji SPSS 21.0. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas Kinerja berpengaruh positif terhadap Internet Reporting. Kompetisi Politik, Kekayaan Daerah, Opini Audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Internet Reporting.

Kata Kunci: Kompetisi politik, Kekayaan Daerah, Opini Audit, Akuntabilitas Kinerja, Internet Reporting

ABSTRACT : This study aims to examine the effect of political competition, regional wealth, audit opinion, performance accountability on the Internet Reporting of Local Governments in Indonesia. This research method uses Archival Technique by testing hypotheses. The population in this study consisted of Local Government level 415 and 93 city levels in 2017. Data collection was carried out by looking at the data needed,

taking notes, analyzing annual reports in district and city governments in 2017. Testing the hypothesis in this study using linear regression multiple. The collected data was analyzed first by testing the classical assumptions and then carried out hypothesis testing using SPSS 21.0 test equipment. Based on the results of the study it can be concluded that the Performance Accountability variable has a positive effect on Internet Reporting. Political Competition, Regional Wealth, Audit Opinion did not have a significant positive effect on Internet Reporting.

Keywords: Political Competition, Regional Wealth, Audit Opinion, Performance Accountability, Internet Reporting

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam memberikan informasi publik dengan efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-undang tersebut, semakin besar tuntutan pemerintah dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi. Perkembangan teknologi informasi memberikan opsi bagi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas dan transparansi melalui internet. Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia tahun 2016 mencapai 132,7 juta atau setara 51,7% terhadap populasi 256,2 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa internet menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Survei juga menyebutkan konsumsi pengguna tentang berita, masuk tiga besar konten internet yang dicari dengan angka 127,9 juta (96,4%) (Bulein APJII, 2016).

Sejauh ini praktik yang dilakukan pemerintah daerah pada *website* dalam memberikan informasi telah berjalan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peraturan

di Indonesia yang menyebutkan secara implisit tentang pemanfaatan media elektronik dalam mengungkap informasi kepada masyarakat. Peraturan tersebut antara lain PP No.6 Tahun 2008, PP No.3 Tahun 2007, dan Permendagri No.7A Tahun 2007. Akan tetapi, terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum memberikan informasi secara lengkap seperti laporan keuangan dan kinerja (Internet Reporting) pada *website* pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian Trisnawati dan Achmad (2014) yang menemukan bahwa tidak seluruh pemda mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap tiap tahunnya. Sedangkan, untuk menjadi pemerintah daerah yang *good governance*, Pemerintah daerah harus akuntabel dan transparan.

Pada penelitian Nosihana dan Yaya (2016) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktek Internet *reporting* mereka menemukan bahwa kompetisi politik berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan di internet. Dalam hal ini pejabat pemerintah yang sedang menjabat akan berusaha sebaik mungkin memperlihatkan kinerjanya melalui pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintahan. Dengan demikian pejabat akan mendapat perhatian dan kepercayaan dari masyarakat yang telah memilih sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rahman (2013). Dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah agar pada masa pemilihan umum dapat terpilih kembali, transparansi dilakukan melalui internet karena dianggap mudah dan murah serta dapat diakses siapa saja. Selain kompetisi politik, kekayaan daerah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi internet reporting.

Penelitian-penelitian terdahulu seperti yang telah dipaparkan diatas memiliki temuan hasil yang berbeda-beda atau tidak konsisten. Selain itu pada variabel yang sama, namun dengan rumus perhitungan data yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan hasil pada penelitian. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki keterbatasan penelitian. Pada penelitian Nosihana dan Yaya (2016) yang menguji ketersediaan informasi keuangan saja. Akan tetapi pada penelitian ini tidak hanya ketersediaan informasi keuangan namun juga mengenai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Stewardship

Teori *Stewardship* menggambarkan suatu situasi dimana para manajer tidak termotivasi pada tujuan-tujuan inividu seperti materi dan uang melainkan lebih ditekankan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007).

b. Teori Signalling

Teori *signalling* menjelaskan pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah kepada masyarakat yang berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat. Signal pemerintah kepada masyarakat adalah dengan memberikan informasi-informasi baik keuangan maupun kinerja yang mereka lakukan pada *website* pemda.

c. Internet Reporting

Peraturan yang secara implisit menyebutkan tentang pemanfaatan media elektronik dalam mengungkapkan informasi kepada masyarakat antara lain PP No.6 Tahun 2008, PP No.3 Tahun 2007, dan Permendagri No.7A Tahun 2007. Pemerintah yang melakukan internet reporting telah memperlihatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya.

d. Kompetisi Politik

Kompetisi politik memperlihatkan seberapa besar persaingan antara kepala daerah dengan saingan politiknya. Kompetisi politik dapat diukur dengan perbandingan antara jumlah kandidat kepala daerah dengan kursi pemerintahan yang tersedia (laswad, dkk 2005).

e. Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah dapat didefinisikan pada seberapa besar pendapatan asli daerah tersebut (Nosihana & Yaya 2016). PAD merupakan sumber keuangan yang berasal dari daerah itu sendiri.

f. Opini Audit

Opini Audit merupakan suatu laporan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma dan aturan pemeriksaan

akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa (Tobing, 2004).

g. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 2002).

HIPOTESIS PENELITIAN

1. Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap internet reporting
2. Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap internet reporting
3. Opini Audit berpengaruh positif terhadap internet reporting
4. Akuntabilitas Kinerja berpengaruh positif terhadap internet reporting

METODE PENELITIAN

A. Obyek/Subyek Penelitian

Obyek pada penelitian ini berupa daftar nama pemerintah Kabupaten/kota yang terdaftar pada *website* Kementrian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id) pada tahun 2018 dan pengungkapan laporan keuangan dan kinerja pemerintah (Internet Reporting) pada *website-website* Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2017 diindonesia.

B. Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data pengungkapan laporan keuangan dan kinerja Pemkot (Internet Reporting), Kekayaan daerah, Opini audit dan Predikat akuntabilitas Kinerja merupakan variable Independen pada penelitian ini. Data diperoleh dari Internet Reporting melalui website Pemkot yang terdaftar di Kementrian Dalam negeri.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Metode dokumentasi atau penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang telah tersedia di website pemda masing-masing. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat data-data yang dibutuhkan, mencatat, menganalisis annual report pada pemerintah kota tahun 2017.

Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

Pada saat akan melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Tujuan dilakukannya Uji asumsi klasik yaitu untuk mendapatkan parameter yang valid dan andal. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri atas :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Model regresi dikatakan baik apabila nilai residualnya berdistribusi normal yang kemudian dapat dikatakan valid atau tidak bias.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas atau kolinearitas ganda adalah uji yang digunakan untuk mencari tahu apakah ada hubungan linear atau korelasi antar variabel bebas (X) dalam model regresi. Guna mengetahui keberadaan multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi, bisa dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF) dengan kriteria apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance \leq 1$ maka bisa dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, namun apabila nilai $VIF > 10$ dan nilai $tolerance > 1$, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam model regresi tersebut terdapat multikolinearitas antar variabel independennya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan untuk mencari tahu apakah dalam *regression model* terdapat perbedaan varian dari residual pada pengamatan yang satu dengan residual pengamatan yang lainnya. Apabila residual pengamatan yang satu sama dengan residual

di pengamatan yang lain, hal tersebut biasa disebut dengan homoskedastisitas, apabila terdapat perbedaan maka disebut heteroskedastisitas.

B. Uji Hipotesis dan Analisis Data

1. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini teknik pengujian yang digunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis tentang hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen (Nazaruddin dan Basuki, 2015). Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = Internet Reporting
 α = Koefisien konstanta
 β = Koefisien regresi
X1 = Kompetisi Politik
X2 = Kekayaan Daerah
X3 = Opini Audit
X4 = Akuntabilitas Kinerja

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik T)

Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara parsial. Tingkat signifikansi dalam uji statistik t adalah nilai $\alpha = 0,05$. Jika nilai signifikansi $P\text{-Value} < 0,05$ maka hipotesis diterima. Artinya bahwa,

terdapat pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jika nilai signifikansi *P-Value* > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel independen secara parsial (Ghozali, 2011).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted* R^2 makin mendekati 1 maka makin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Diskriptif Statistik

Untuk mengetahui diskriptif setiap variabel pada penelitian ini digunakan analisis descriptive. Ringkasan hasil analisis diskriptif statistik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetisi Politik	38	,22	,91	,6418	,16379
Kekayaan Daerah	38	62878,52	8908920,75	641704,6068	1394698,82165
Opini Audit	38	,00	1,00	,8684	,34257
Internet Reporting	38	2,00	6,00	3,6053	1,05368
Valid N (listwise)	38	,23	1,00	,6974	,19875

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel Kompetisi Politik didapatkan nilai minimum 0.22, nilai maximum 0.91 dan nilai rata-rata (mean) 0.6418.

Analisis Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas. hal ini dilakukan guna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.

a. Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini menggunakan kolmogorov smirnov. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0073953
	Std. Deviation	.33466910
	Absolute	.119
Most Extreme Differences	Positive	.095
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		.732
Asymp. Sig. (2-tailed)		.657

Sumber : Data Sekunder 2018

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui nilai *asymp.sig* sebesar 0,657 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	sig	batas	Keterangan
Kompetisi Politik	0.525	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Kekayaan Daerah	0.861	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Opini Audit	0.058	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Akuntabilitas Kinerja	0.112	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas

Sumber : Data Sekunder, 2018

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 5%, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas.

c. Uji Multikolineartias

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* (α).

Tabel 4.6
Uji Multikolineartias

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kompetisi Politik	0.833	1.200	Tidak terjadi multikolinieritas
Kekayaan Daerah	0.971	1.030	Tidak terjadi multikolinieritas
Opini Audit	0.908	1.290	Tidak terjadi multikolinieritas
Akuntabilitas Kinerja	0.811	1.232	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data Sekunder 2018

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Analisis Regresi Berganda

Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Beta	t hitung	Sig t	Keterangan	Simpulan hipotesis
(Constant)	9.659				
Kompetisi Politik	0.101	0.099	0.595	Tidak Signifikan	H ₁ Ditolak
Kekayaan Daerah	0.015	0.215	0.831	Tidak Signifikan	H ₂ Ditolak
Opini Audit	0.146	0.110	0.913	Tidak Signifikan	H ₃ Ditolak
Akuntabilitas Kinerja	0.328	1.949	0.061	Signifikan	H ₄ Diterima
Adjusted R Square	0.093				

Sumber : Data Sekunder 2018

a) Pengujian hipotesis

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen yaitu Kompetisi Politik, Kekayaan Daerah dan Opini Audit dengan variabel dependen yaitu Internet Reporting Pemerintah Daerah.

- 1) Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0.595 ($0.595 > 0,10$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a1} ditolak, yang berarti bahwa “Kompetisi Politik tidak berpengaruh positif terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah”.

- 2) Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0.831 ($0.831 > 0,10$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a2} ditolak, yang berarti bahwa “Kekayaan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah”.
- 3) Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0.913 ($0.913 > 0,10$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a3} ditolak, yang berarti bahwa “Opini Audit tidak berpengaruh positif terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah”.
- 4) Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0.061 ($0.061 < 0,10$). Nilai tersebut dapat membuktikan H_{a4} Diterima, yang berarti bahwa “Akuntabilitas Kinerja berpengaruh positif terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah”.

b) Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) = 0.093, artinya variabel bebas secara bersama–sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 9,3% sisanya sebesar 90,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

PEMBAHASAN

a. Pengaruh Kompetisi Politik Terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetisi Politik tidak berpengaruh signifikan terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan politik di Indonesia tidak cukup kompetitif (Afryansyah dan Haryanto, 2013). Menurut mereka kebanyakan kepala calon pejabat daerah mendominasi suara pemilihan kepala daerah. Sehingga hal ini tidak cukup menyebabkan kekhawatiran bagi kepala daerah yang sedang menduduki jabatannya.

b. Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kekayaan Daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah. Nilai rata-rata kekayaan pemda yang tidak cukup besar, menyebabkan rendahnya keingintahuan masyarakat atas kinerja pemerintah daerahnya dalam mengelola kekayaan daerah yang dimiliki (Afryansyah dan Haryanto, 2013). Kekayaan daerah yang tinggi merupakan indikator kesuksesan suatu pemerintahan dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya, serta kesuksesan dalam hal mengelola keuangan.

c. Pengaruh Opini Audit Terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Opini Audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah. Opini auditor merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini auditor merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini audit secara bertingkat terdiri dari : Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Trisnawati dan Achmad, 2014).

D. Pengaruh Akuntabilitas kinerja terhadap internet reporting pemerintah daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah. Akuntabilitas Kinerja yang diukur dengan melihat hasil rapor evaluasi yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menemukan bukti bahwa Akuntabilitas Kinerja mempunyai pengaruh terhadap internet reporting. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gusti Indira (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh pada internet financial reporting.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian data, maka dapat disimpulkan Kompetisi Politik, Kekayaan Daerah, Opini Audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah. Akan tetapi variabel Akuntabilitas Kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah.

Daftar pustaka

- Andriani, Yelvina. (2009). Analisis Pengaruh Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera. Artikel Ilmiah. Padang: Fakultas Ekonomi Padang.
- Bertot, John C, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes. 2010. *Using ICT to Create a Culture of Transparency : E-government and Social Media as Openness and Anti-corruption Tools for Societies*. Government Information Quarterly. Vol 00659.
- Evans, J., dan J. Patton. 1987. Signalling and Monitoring in Public Sector Accounting. *Journal of Accounting Research* 25, pp. 130–158. <http://www.jstor.org/>
- Febrianty S.Y., dan Jatmiko W.T. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela Oleh Pemda. *Jurnal Universitas Diponegoro*. <http://eprints.undip.ac.id/>.
- Ghozali, I. dan Chariri, A. 2007, *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam., (2011), *Aplikasi Analisis Multivariats dengan Program IBM SPSS 19*, Cetakan 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handayani, Sri. 2010. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2006. *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. VII, No. 2, Tahun 2010. STIA LAN Jakarta. Hendriksen, dan M. Van Brenda. (1991). *Accounting Theory*. USA: Mc.Graw-Hill
- Hilmi, A.K., dan Martani, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Hudoyo, Y.T., 2014, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Di Internet Oleh Pemerintah Daerah”, *Accounting Analysis Journal* 3 (4).

- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial Economics, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Khasanah, N.L., 2014, “Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014, Halaman 1-11
- Laswad, F., Fisher. R., dan Oyelere. P. 2005. Determinants of Voluntary Internet *Financial Reporting* by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy, 24
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. , 2005. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2 (1), 1-17.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. T. (2017). *Analisis Statistik dengan SPSS, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Nosihana, Ariefia, dan Rizal Yaya, 2016, “Internet *Financial Reporting* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol. 3(2), 2016, pp 89-104.
- Nurritziana, 2017, “Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 1, Hlm: 28-47.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007. *Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008. *Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007. (2007). *Tatacara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah*.
- Puspita, R dan Martani,D,. 2010. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda.Jurnal dan Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi. Vol. 2 No. 1 Juni 2007:37-46
- Rahman, Aditya. Sutaryo. Agus, Budiarmanto, 2013, "Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XVI* Hal. 129- 155, 2013. Manado.
- Rahmawati, J.D.W. 2013. Jurnal. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14. Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. Instruksi Mendagri No. 188/1797/SJ. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Riduan Tobing dan Nirwana, (2004). *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta, Atalya Rileni Sucedo.
- Styles, Alan K., dan Mack Tennyson. 2007. "The Accessibility Of Financial Reporting U.S. Municipalities On The Internet". *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 19, No.1, hal.56-92.
- Trisnawati, M,D., & Achmad, K,. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemda melalui Internet. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram. Lombok.

Transparency International, 2017, http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2017/11/IPK-2017_Slide-Presentation_launch.pdf (diakses tanggal 16 maret 2018).

Buletin APJII
<https://apji.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI05November2016.pdf>.
(diakses tanggal 16 maret 2018)